

C.4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. FUNGSI PERENCANAAN

Prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2019 lebih difokuskan pada percepatan penyelesaian sasaran dan target pembangunan utamanya pelayanan dasar yang belum tercapai serta meningkatkan daya saing dalam menghadapi tantangan menuju "*Jateng The Next Level*". Selain itu, pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2019 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Jawa Tengah untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karakteristik masing-masing.

Prestasi pada Tahun 2019 adalah memperoleh Penghargaan **Perencanaan Pembangunan Daerah Terbaik Pertama Tingkat Nasional**, penghargaan tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinobatkan menjadi pemerintah daerah dengan perencanaan pembangunan dan pencapaian terbaik se Indonesia, didukung dengan inovasi Dialog Interaktif Legislatif-Eksekutif dalam proses perencanaan penganggaran dan inovasi *Jateng gayeng nginceng wong meteng* dalam pencapaian penurunan AKI-AKB.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Fungsi Penunjang Pemerintahan Perencanaan dilaksanakan melalui 4 Program, yaitu Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan dengan 7 Indikator Kinerja Program. Perincian ketercapaian dari 7 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Fungsi Perencanaan L-I.C.1.1-2.

Dari Lampiran Indikator Kinerja Program Fungsi Perencanaan L-I.C.1.1-2 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup memiliki 2 indikator yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%), 2) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya memiliki 2 indikator yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%), 3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi memiliki 2 indikator yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%), 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 1 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%).

Secara keseluruhan, semua indikator memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%). Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah
1	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup	2	2	-	-	-	-
2	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	2	2	-	-	-	-
3	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2	2	-	-	-	-
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	-	-	-	-
Jumlah		7	7	-	-	-	-

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Perencanaan Pembangunan Ekonomi, memiliki 2 indikator kinerja program, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu: Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang Perekonomian dengan realisasi capaian sebesar 90% sesuai target; dan Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang Perekonomian dengan realisasi capaian sebesar 90% sesuai target.

Penyelenggaraan program Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai manfaat yaitu :

- a. Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi sektor pertanian dan kelautan, ekonomi dan ketenagakerjaan dan keuangan, kerjasama dan investasi yang sinergi dan selaras dengan program-program strategis di Jawa Tengah.
- b. Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan Perekonomian Daerah dalam rangka menciptakan sinergitas dan keselarasan program-program strategis di Jawa Tengah.
- c. Terlaksananya fasilitasi program strategis melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dalam rangka mewujudkan pengembangan perekonomian lokal dan regional yang sinergis dan inklusif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat;

Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya, memiliki 2 indikator kinerja program, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya dengan realisasi capaian sebesar 90% sesuai target; dan Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya dengan realisasi capaian sebesar 90% sesuai target.

Penyelenggaraan program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya mempunyai manfaat yaitu :

- a. Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam perencanaan, kebijakan, cara pandang dan pendekatan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- b. Terlaksananya fasilitasi pengembangan program strategis melalui peningkatan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan.

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi bidang Pemerintahan, pemberdayaan masyarakat & desa; lingkup pendidikan dan mental spiritual, dan lingkup kesejahteraan sosial.

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, memiliki 2 indikator kinerja program, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu: Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan realisasi capaian sebesar 90% sesuai target; dan Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan realisasi capaian sebesar 90% sesuai target.

Penyelenggaraan program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai manfaat yaitu:

- a. Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi, serta pembinaan pembangunan infrastruktur dan perhubungan, pengembangan wilayah, permukiman, pertanahan, serta sumber Daya Alam dan lingkungan hidup dalam rangka menciptakan sinergitas dan keselarasan program-program strategis di Jawa Tengah;
- b. Terlaksananya fasilitasi program strategis melalui penyusunan KLHS, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang sinergis dan inklusif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah, memiliki indikator kinerja program, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu: Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan dengan realisasi capaian sebesar 90% sesuai target.

Penyelenggaraan program Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai manfaat yaitu :

- a. Peningkatan kualitas koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Peningkatan keterpaduan perencanaan sektoral dan perwilayahan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
- c. Peningkatan fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dalam mewujudkan konsistensi kegiatan pembangunan mengacu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan guna pencapaian target pembangunan daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
- d. Peningkatan penyediaan data dan informasi secara valid dan aktual.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan Perencanaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar Rp41.625.381.000,00 dengan rincian **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp25.190.391.000,00 dan **Belanja Langsung sejumlah** Rp16.434.990.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 4 program dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,59%.

1) Belanja Langsung (alokasi dan realisasi)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00, realisasi fisik 100% dan keuangan 99,75%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pertanian dan kelautan; Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan; Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi. Dengan keluaran tersusunnya 2 dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup pertanian dan kelautan yaitu Dokumen Capaian RAD Pangan dan Gizi, Dokumen Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan, tersusunnya 2 dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan yaitu Evaluasi Tahunan Pemberdayaan Ekonomi Lokal (PEL) dan Laporan Kegiatan Ekonomi dan Tenaga Kerja, serta tersusunnya 1 dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup keuangan, kerjasama dan investasi yaitu Laporan Kegiatan Keuangan, Kerjasama dan Investasi.

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.234.990.000,00, realisasi fisik 100% dan keuangan 97,02%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa dengan keluaran tersusunnya 3 dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu Dokumen Perencanaan Lingkup Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dokumen Ketercapaian Lingkup Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023; dan Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pendidikan dan mental spiritual dengan keluaran tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pendidikan dan mental spiritual dengan keluaran tersusunnya 2 dokumen yaitu RAD SDGs Provinsi Jawa Tengah 2019-2023 dan Laporan Akhir Pendidikan Mental Spiritual 2019. Penyusunan dokumen perencanaan dan ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup kesejahteraan sosial dengan keluaran tersusunnya 1 dokumen perencanaan dan ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup kesejahteraan sosial yaitu Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00, realisasi fisik 100% dan keuangan 99,36%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup infrastruktur pembangunan; Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan; Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup SDA dan LH dengan keluaran tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup infrastruktur pembangunan sebanyak 1 dokumen yaitu Pengelolaan Aplikasi Simbankeu dan Pengelolaan Aplikasi Infrastruktur Spasial; tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan sebanyak 2 dokumen yaitu Studi Pengembangan Wilayah Terpadu dan Kerjasama Pembangunan Daerah Perbatasan; tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup SDA dan LH sebanyak 2 dokumen yaitu Laporan Perencanaan dan Ketercapaian Pelaksanaan Program Kegiatan Lingkup SDA dan LH, serta Laporan Rencana Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.700.000.000,00, realisasi fisik 100% dan keuangan 98,56%. Kegiatan yang mendukung program tersebut antara lain: Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan keluaran tersusunnya 3 dokumen (RKPD Tahun 2019 Perubahan, RKPD Tahun 2020, Penetapan RPJMD Tahun 2018-2023); dan Penyusunan Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah dengan keluaran tersusunnya 7 dokumen (Evaluasi RPJMD Provinsi, Evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2019, Evaluasi RKPD Kab/Kota, Fasilitasi RKPD Kab/Kota Tahun 2019 Perubahan, Fasilitasi RKPD Kab/Kota Tahun 2020, Evaluasi APBN, dan Evaluasi RPJMD Kab/Kota); Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pembangunan Daerah dengan keluaran tersusunnya 1 dokumen (Analisa Data dan Informasi Kawasan Pengembangan Wilayah Jawa Tengah).

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.C.1.1-2.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Terhadap Fungsi Perencanaan pada LKPJ Gubernur TA 2018, DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan bahwa perlu dilakukan antisipasi terhadap Perkembangan Dinamika Peraturan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan mengoptimalkan Masukan dan Tuntutan Masyarakat serta Stakeholders Perencanaan Pembangunan.

Hal ini ditindaklanjuti dengan perencanaan pembangunan disusun salah satunya melalui pendekatan partisipatif dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat yang diimplementasikan melalui berbagai forum perencanaan (konsultasi publik, forum PD, musrenbang) dan teknologi informasi (sistem aplikasi/*e-planning*) yang bertujuan untuk memperoleh saran dan masukan dari sejumlah *stakeholders* pembangunan.

Pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat dan stakeholder diantaranya DPRD, parpol, LSM, dunia usaha dan perguruan tinggi yaitu pada forum konsultasi publik rancangan awal RKPD, forum PD, musrenbangwil, musrenbangprov, dialog interaktif Eksekutif Legislatif dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh saran dan masukan serta usulan yang semakin optimal, pencapaian kondisi tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah usulan hasil Musrenbang dari 38.556 usulan sebesar Rp.20,352 Triliun pada Musrenbang Tahun 2018 menjadi 56.443 usulan sebesar Rp.42,490 Triliun pada Musrenbang Tahun 2019.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Belum sepenuhnya aspirasi masyarakat dan dinamika permasalahan pembangunan dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi;

- 2) Ketersediaan data dan informasi belum sepenuhnya sesuai dengan dinamika kebutuhan data perencanaan pembangunan.

Solusi

- 1) Meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan integrasi program kegiatan dengan Nasional dan Kabupaten/Kota serta pengembangan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah *e-planning*;
- 2) Penguatan ketersediaan, akurasi data dan informasi dalam penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan daerah.